

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Urip Santoso, *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law*, Gadjah mada university Press, Yogyakarta. 2005,
- Nandang sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta. 1993 hal. 65-66. Dikutip Ridwan,
- Lutfi Efendi, "Pokok-pokok Hukum Administrasi," Bayumedia Publishing, Malang 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, 2006.
udargo Gautama dan G. Sukahar-Badawi, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Alumni, 1973.
- Sri Hajati, *Kewenangan Negara atas Tanah*, Yuridika vol 18 no.2 maret –april 2003.
E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas. 2003.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, fokusmedia, Bandung, 2010.
- Johanes usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambanan, Jakarta 2002.

Bachsan Mustofa, *System Hukum Indonesia Terpadu*, citra aditya bakti, 2003.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya paramita, Jakarta, 2008.

Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni Bandung, Cetakan 1 1993
Bandung.

Teguh Samudra, *Hukum pembuktian Dalam acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Hukum cara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta cetakan pertama 2008.

Satjipto Raharjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009

A.P. Parlindungan, *Penaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999,

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU- III/2005 mengenai pengujian undang-undang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU III/2005 mengenai pengujian undang-undang Sumber Daya Air

Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 dan

Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4609)

Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan

Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinyahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keunagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4287).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No4587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ktentuan Pokok Pertambangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 1967 No 22).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara NO 104).

JURNAL

Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Majalah YURIDIKA, No.5 dan No. 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-oktober 1997 hal.2,5 dan 7.

Sri Hajati, Sri, *Kewenangan Negara atas Tanah, Yuridika* Vol 18no.2 maret-april 2003.